

Kampus Benteng Pancasila sebagai Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan: Integrasi Nasionalisme dan Kewargaan Global

Deni Zein Tarsidi¹, Bramastia², Leo Agung Sutimin³, Winarno⁴, Djono⁵, Endrise Septina Rawanoko⁶, Andrea Salsalova⁷

Pusat Studi Pengamalan Pancasila, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia^{1,2,3,4,5,6,7}

Email: denizein@staff.uns.ac.id¹

Abstract

Gagasan Kampus Benteng Pancasila berangkat dari pertanyaan yang sederhana namun menentukan: bagaimana kampus dapat menjadi laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan yang mampu mengintegrasikan nasionalisme dan kewargaan global tanpa menjadikan keduanya saling meniadakan. Artikel ini bertujuan menjelaskan mekanisme integrasi tersebut melalui desain kualitatif dengan metode studi kasus di Universitas Sebelas Maret. Data dihimpun dari analisis dokumen institusional dan dokumen program, observasi pada ruang serta aktivitas kampus yang berfungsi sebagai simpul nilai, dan wawancara semi-terstruktur dengan civitas akademika (pengelola program, dosen, dan mahasiswa lintas latar). Analisis tematik menunjukkan empat temuan utama: (1) Pancasila bekerja sebagai pengalaman ruang yang menormalisasi perjumpaan lintas identitas; (2) integrasi nilai menguat ketika pembelajaran bergerak melalui pengalaman partisipasi yang disertai refleksi moral; (3) kewargaan global paling bermakna saat berjangkar pada tanggung jawab kebangsaan dan diterjemahkan ke isu-isu publik yang dialami mahasiswa; (4) kualitas dialog dan rasa diakui menjadi prasyarat agar keterlibatan tidak jatuh ke kepatuhan seremonial. Berdasarkan temuan tersebut, artikel ini menawarkan konsep “arena integrasi” sebagai model kerja kampus melalui ruang proyek kewarganegaraan, pengalaman, refleksi, dan dialog dirajut sebagai rangkaian cara untuk membentuk nasionalisme yang matang dan kewargaan global yang membumi. Keterbatasan studi ini terletak pada sifatnya sebagai kasus tunggal dan belum menelusuri dampak jangka panjang, sehingga riset komparatif lintas kampus dan studi longitudinal disarankan untuk menguji ketahanan mekanisme integrasi serta menyusun indikator operasional yang lebih tajam.

Keywords: Kampus Benteng Pancasila, Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan, Nasionalisme, Kewargaan Global



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

INTRODUCTION

Lahirnya gagasan “Kampus Benteng Pancasila” terasa masuk akal bila kewarganegaraan dibaca sebagai pengalaman hidup, bukan sekadar materi kuliah. Di kampus, mahasiswa bukan hanya mempelajari Pancasila sebagai teks, tetapi menjalani Pancasila sebagai realistik nyata melalui ruang, simbol, kebiasaan, dan keputusan sehari-hari. Di titik ini, kampus bisa dibayangkan sebagai laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan: tempat nasionalisme diuji dalam praktik, sekaligus tempat kewargaan global dipelajari tanpa harus “mengurangi” kecintaan pada Indonesia..

Masalahnya, Pendidikan Kewarganegaraan sering terjebak pada pola lama: menuntut hafalan fakta, menonjolkan narasi heroik, lalu berharap lahir keterlibatan warga secara otomatis. Banks mengingatkan bahwa kurikulum yang “triumfalistik” dan satu dimensi justru gagal mengajak peserta didik memahami kompleksitas kebebasan, ketimpangan, dan perjuangan keadilan (Banks, 2015). Ketika pembelajaran seperti ini dominan, yang tumbuh bukan rasa memiliki, melainkan kejenuhan bahkan jarak emosional terhadap politik dan kehidupan publik. Dalam kerangka Banks, kondisi itu dekat dengan gejala *failed citizenship*:

ketika sistem sosial-politik membuat kelompok tertentu merasa tidak sungguh-sungguh diakui, sehingga identitas dan loyalitas kebangsaannya melemah, dan partisipasi politiknya minimal (Banks, 2015)

Kegelisahan serupa muncul dalam studi tentang generasi muda di berbagai demokrasi. Pontes, Henn, dan Griffiths menunjukkan adanya kekhawatiran jangka panjang tentang “penarikan diri” warga dari partisipasi demokratis, terutama pada kelompok muda (Ana Isabel Pontes et al., 2019). Menariknya, mereka juga menegaskan bahwa faktor pembentuk keterlibatan politik anak muda itu rumit: dipengaruhi keluarga, teman sebaya, media, organisasi, dan sekolah. Artinya, kelas kewarganegaraan yang baik tidak bisa bekerja sendiri; ia butuh ekosistem. Di sisi lain, penelitian juga memberi harapan: partisipasi dalam kelas kewarganegaraan sering disebut sebagai prediktor kuat bagi *voting* dan keterlibatan demokratis di masa dewasa, dengan efek yang cenderung bertahan (A I Pontes, 2019).

Di sinilah perguruan tinggi menjadi penting. Pendidikan Kewarganegaraan pada level kampus memiliki peluang yang tidak dimiliki sekolah: ruang otonomi lebih besar, perjumpaan lintas latar lebih beragam, dan akses langsung pada isu publik yang “*real time*”. Beberapa literatur tentang Pendidikan kewarganegaraan menunjukkan bahwa keterlibatan sipil tidak cukup dibangun lewat ceramah; ia membutuhkan pengalaman. Program *service-learning*, misalnya proyek pelayanan masyarakat yang terintegrasi dengan kurikulum dipandang dapat memperkuat *civic engagement* karena mahasiswa mengalami hubungan konkret antara kelas dan kebutuhan komunitas, lalu diajak refleksi atas pengalaman itu (Lin, 2015). Penekanan pada refleksi ini terasa manusiawi: tindakan warga tidak hanya dinilai dari ramai-ramai ikut kegiatan, tetapi dari proses memahami mengapa sebuah tindakan publik layak dilakukan.

Pada saat yang sama, dunia yang dihadapi mahasiswa sudah jauh lebih “global” dan saling terhubung. UNESCO, lewat kerangka *Global Citizenship Education*, menekankan kebutuhan membangun pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap agar peserta didik mampu berkontribusi pada dunia yang lebih damai, adil, dan berkelanjutan (Oxfam, 2006; UNESCO, 2020a; Zahabioun et al., 2013). OECD juga menempatkan *global competence* sebagai kemampuan untuk memahami isu global, menghargai perspektif berbeda, berinteraksi lintas budaya, dan bertindak untuk kebaikan bersama (OECD, 2025). Dalam konteks Indonesia, hal ini menuntut perenungan: bagaimana menjadi warga dunia tanpa kehilangan jangkar kebangsaan? Pancasila sebenarnya menyediakan bahasa etik untuk menjembatani ketegangan itu, ketuhanan yang memuliakan martabat, kemanusiaan yang menolak dehumanisasi, persatuan yang tidak paranoid, kerakyatan yang mengutamakan musyawarah, dan keadilan sosial yang menolak ketimpangan.

Gagasan “Kampus Benteng Pancasila” di UNS bergerak di wilayah jembatan itu. Secara historis, UNS menarasikan pengukuhan dirinya sebagai Kampus Benteng Pancasila (termasuk momentum deklarasi) sebagai komitmen nilai yang ingin dihidupkan dalam budaya kampus (Antara, 2018). Model wisata kampus Pancasila ditampilkan sebagai upaya menghadirkan Pancasila bukan hanya sebagai slogan, tetapi sebagai pengalaman ruang: ada “titik-titik simbolik” seperti tempat ibadah semua agama/keyakinan yang diakui negara sebagai penguat nasionalisme dan karakter toleransi dan mengakui ada keberagaman dalam perspektif agama (Tarsidi, 2025). Pada saat yang sama, model itu juga dibaca sebagai jalan untuk menumbuhkan kewargaan global melalui praktik pendidikan, pariwisata kampus, dan kultur akademik yang membuka dialog lintas batas.

Titik kebaruan yang hendak ditegaskan artikel ini terletak pada cara memandang kampus. Kampus tidak diposisikan sebagai “panggung” tempat nasionalisme dan kewargaan global hadir berdampingan tanpa saling menyentuh, melainkan sebagai arena integrasi yang sengaja dirancang agar keduanya saling membentuk. Dalam praktik pendidikan, nasionalisme

kerap diperlakukan sebagai urusan “ke dalam” menguatkan identitas bangsa, meneguhkan simbol, merawat loyalitas. Kewargaan global diposisikan sebagai urusan “ke luar” merespons tuntutan dunia, jargon internasionalisasi, atau sekadar menambah wawasan lintas budaya. Cara membelah seperti ini tampak rapi, tetapi diam-diam membuat pembelajaran kehilangan daya ubah. Pancasila justru menawarkan kompas etik untuk menyatukan keduanya: nasionalisme yang dewasa tidak anti-dunia, sementara kewargaan global yang bermakna tidak mengambang tanpa akar. Di titik perjumpaan itu, mahasiswa belajar menautkan tanggung jawab pada tanah air dengan kepedulian pada masalah bersama, seperti: krisis iklim, misinformasi, ketimpangan, hingga intoleransi sebagai bagian dari satu pekerjaan kewargaan yang sama.

Dengan kerangka tersebut, “Kampus Benteng Pancasila sebagai Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan” dimaksudkan untuk menempatkan UNS (dan kampus pada umumnya) sebagai ruang belajar yang utuh, bukan sekadar ruang kuliah. Yang dipadukan bukan hanya materi tentang kewarganegaraan, tetapi juga pengalaman partisipasi, latihan refleksi moral, dan perjumpaan lintas identitas yang nyata. Laboratorium di sini berarti ada “situasi sosial” yang memungkinkan nilai diuji, bukan hanya diucapkan. Pendidikan kewarganegaraan tidak lagi berhenti pada ukuran sederhana, apakah mahasiswa memahami konsep atau tidak. Ia bergeser ke pertanyaan yang lebih pelan namun lebih menuntut: ketika berhadapan dengan masalah publik, nilai apa yang sungguh dipilih untuk dihidupi, dan tindakan apa yang sanggup diambil tanpa merusak martabat manusia.

RESEARCH METHODS

Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif-interpretif dengan metode studi kasus, karena gagasan “Kampus Benteng Pancasila” dipahami sebagai praktik sosial yang hidup, terlihat dalam kebijakan, simbol ruang, kebiasaan, dan pengalaman warga kampus bukan sekadar slogan atau materi kuliah. UNS dipilih sebagai kasus tunggal yang kaya untuk membaca bagaimana nasionalisme dan kewargaan global tidak diletakkan berdampingan secara pasif, melainkan diupayakan menjadi arena integrasi yang sengaja dirancang. Batas kasus ditetapkan pada tiga ranah yang saling bertaut: narasi dan kebijakan institusional tentang Kampus Benteng Pancasila, pengalaman ruang dan simbol (termasuk titik-titik simbolik serta model wisata kampus Pancasila), serta praktik pedagogi dan pengalaman mahasiswa dalam pembelajaran dan aktivitas kemahasiswaan yang memunculkan latihan kewarganegaraan.

Sumber data diperoleh melalui analisis dokumen, observasi lapangan, dan wawancara semi-terstruktur. Dokumen yang dikaji mencakup pernyataan resmi, materi publikasi, naskah atau rilis terkait deklarasi, serta dokumen program yang merepresentasikan bagaimana kampus membingkai Pancasila, nasionalisme, toleransi, dan horizon globalnya. Observasi dilakukan pada ruang-ruang publik dan kegiatan kampus yang berfungsi sebagai simpul nilai, tempat Pancasila “diuji” melalui interaksi nyata, bukan hanya diucapkan dengan posisi peneliti sebagai pengamat partisipatif moderat agar dapat menangkap dinamika sosial sekaligus menjaga jarak reflektif. Wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan partisipan yang dipilih secara purposive untuk merepresentasikan variasi pengalaman dan peran, seperti pengelola program/narasi Kampus Benteng Pancasila, dosen pengampu MKWK/PKn atau pembina kegiatan kemahasiswaan, mahasiswa dari latar dan angkatan berbeda, serta pihak yang terlibat dalam kegiatan simbolik atau wisata kampus; jumlah partisipan mengikuti kecukupan makna sampai tema-tema mulai berulang (Creswell, 2010).

Analisis data dilakukan secara tematik dengan memadukan gerak induktif dan deduktif. Peneliti membaca data berulang, menyusun kode awal dari transkrip, catatan observasi, dan dokumen, lalu mengelompokkan kode menjadi tema yang menggambarkan mekanisme

integrasi nasionalisme dan kewargaan global di dalam kehidupan kampus. Kerangka konseptual seperti kritik kurikulum triumphalistik dan gejala *failed citizenship* (Banks, 2015), penekanan pengalaman-refleksi dalam pembelajaran kewarganegaraan (Lin, 2015), serta orientasi kompetensi kewargaan global (OECD, 2025; UNESCO, 2020b) digunakan sebagai *sensitizing concepts* yang memandu analisis tanpa memaksa data agar patuh pada teori. Untuk menjaga ketelitian, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan teknik, melakukan konfirmasi terbatas atas ringkasan temuan kunci kepada beberapa partisipan (*member checking*), serta menjaga jejak keputusan analisis melalui catatan reflektif (*analytic memo*) dan dokumentasi proses (*audit trail*) (Braun & Clarke, 2006). Secara etis, penelitian menekankan persetujuan sadar, kerahasiaan identitas partisipan, serta kehati-hatian pada relasi kuasa di lingkungan kampus, terutama agar mahasiswa merasa aman menyampaikan pengalaman yang mungkin kritis tanpa konsekuensi akademik.

RESEARCH RESULTS AND DISCUSSION

Research Result

Data penelitian ini ditopang oleh tiga jenis bahan: (1) dokumen institusional dan dokumen program yang merepresentasikan narasi “Kampus Benteng Pancasila”, (2) observasi pada ruang publik/kegiatan kampus yang berfungsi sebagai simpul nilai, dan (3) wawancara semi-terstruktur dengan civitas akademika, mulai dari pengelola program, dosen pengampu/pembina, sampai mahasiswa dengan latar dan angkatan berbeda. Dalam situasi pengumpulan data, tampak bahwa “Benteng Pancasila” lebih mudah ditangkap bukan lewat satu peristiwa besar, melainkan lewat rangkaian kejadian kecil yang berulang: bagaimana ruang ditata, bagaimana simbol diberi makna, bagaimana dialog (atau ketegangan) dikelola, dan bagaimana mahasiswa menautkan semua itu dengan pengalaman kewargaan mereka sendiri.

Tema pertama yang muncul adalah Pancasila sebagai pengalaman ruang (*spatialized civics*). Tema ini berarti bahwa Pancasila tidak hanya hadir sebagai wacana normatif, tetapi “menubuh” dalam tata ruang, titik simbolik, dan kebiasaan interaksi di ruang publik kampus sehingga mahasiswa mengalami nilai melalui perjumpaan yang konkret. Bukti tema ini biasanya tampak saat dokumen dan narasi program menegaskan keberadaan “titik-titik simbolik” (misalnya ruang ibadah lintas agama/keyakinan, rute wisata kampus Pancasila), lalu observasi memperlihatkan bagaimana titik itu dipakai, apakah menjadi ruang perjumpaan, sekadar latar foto, atau bahkan dihindari pada momen tertentu (Dokumen D1; Observasi-1). Di wawancara, tema ini sering muncul sebagai narasi pengalaman: mahasiswa menyebut nilai persatuan/toleransi bukan sebagai hafalan, melainkan sebagai “rasa” yang muncul ketika berada dalam ruang yang menormalisasi keberagaman (Wawancara Mhs-2). Nuansanya tidak seragam: sebagian mahasiswa mengalami ruang simbolik sebagai penguat identitas kebangsaan yang inklusif, sementara sebagian lain merasa simbolnya “ada” tetapi tidak otomatis mengubah relasi sosial jika tidak disertai fasilitasi dialog yang konsisten (Wawancara Mhs-4).

Tema kedua adalah integrasi nasionalisme–kewargaan global melalui pedagogi pengalaman dan refleksi (*experiential–reflective civic learning*). Tema ini berarti bahwa proses kewargaan di kampus menjadi lebih bermakna ketika mahasiswa tidak berhenti pada pengetahuan konsep, tetapi menjalani pengalaman (misalnya kegiatan pengabdian, proyek sosial, praktik organisasi) lalu diminta memikirkan ulang pengalaman itu dalam bingkai etik Pancasila. Dalam data, pola ini biasanya terlihat ketika dokumen kurikuler/kegiatan menekankan keterlibatan dan refleksi, observasi menangkap adanya sesi reflektif (formal maupun informal), lalu wawancara menunjukkan perubahan cara pandang: mahasiswa mulai

memaknai tindakan publik sebagai pilihan nilai bukan sekadar ikut kegiatan (Dokumen D2; Observasi-2; Wawancara Mhs-1). Variasi penting muncul pada kualitas refleksi: pada kelompok tertentu refleksi bergerak ke pertanyaan moral (misalnya tentang martabat, keadilan, dan cara bertindak tanpa merendahkan pihak lain), sementara pada kelompok lain refleksi berhenti sebagai laporan kegiatan administratif (Wawancara Dsn-2 vs. Wawancara Mhs-5). Perbedaan ini memberi petunjuk bahwa “pengalaman” saja belum cukup; pengalaman perlu dipandu agar tidak berubah menjadi rutinitas.

Tema ketiga adalah kewargaan global yang berjangkar (*anchored global citizenship*). Tema ini berarti bahwa orientasi global tidak dipahami sebagai “internasionalisasi” yang mengambang, melainkan sebagai kemampuan membaca isu global melalui tanggung jawab kebangsaan, misinformasi, krisis iklim, ketimpangan, intoleransi yang terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari mahasiswa. Bukti temanya biasanya muncul ketika dokumen dan program kampus memakai bahasa “global” (kolaborasi, dialog, keberlanjutan), tetapi wawancara menunjukkan momen ketika mahasiswa benar-benar mengaitkannya dengan pilihan tindakan di lingkungan lokal: memilih sumber informasi, mengelola perbedaan, atau menyusun aksi sosial yang tidak sekadar simbolik (Dokumen D3; Wawancara Mhs-3). Nuansa di sini cukup tajam: ada mahasiswa yang menganggap “global” sebagai perluasan empati dan jejaring untuk masalah bersama, ada pula yang memaknai “global” sebagai label prestise yang jauh dari realitas sosial kampus (Wawancara Mhs-6). Perbedaan ini penting karena memperlihatkan bahwa integrasi nilai tidak otomatis terjadi hanya karena istilah “*global competence*”.

Tema keempat adalah tata kelola dialog dan rasa diakui (*recognition*). Tema ini berarti bahwa laboratorium kewargaan bekerja ketika kampus menyediakan ruang aman untuk berbeda pendapat dan merasa diakui sebagai bagian dari komunitas politik kampus; sebaliknya, ia melemah ketika kritik dianggap ancaman atau ketika sebagian kelompok merasa hanya “ditampilkan” tanpa benar-benar didengar. Pada data, tema ini sering tampak sebagai ketegangan antara narasi resmi yang harmonis dan pengalaman lapangan yang lebih kompleks: dokumen menonjolkan persatuan, tetapi wawancara mengisahkan momen-momen ketika mahasiswa ragu bersuara, atau merasa pembicaraan tentang kebangsaan terlalu satu arah (Dokumen D1; Wawancara Mhs-7). Observasi pada forum-forum diskusi/organisasi biasanya memperlihatkan indikator kecil: siapa yang berbicara, siapa yang diam, dan bagaimana perbedaan dikelola (Observasi-3). Triangulasi di sini sering menemukan titik konflik produktif: narasi institusi mengklaim keterbukaan, tetapi praktiknya bergantung pada fasilitator, kultur unit, dan sensitivitas isu yang sedang dibicarakan. Di antara pola-pola di atas, muncul kasus menyimpang yang justru membantu membaca batas laboratorium ini: sebagian mahasiswa menunjukkan “kelelahan simbolik” mengakui pentingnya Pancasila, tetapi merasa kegiatan terlalu seremonial sehingga tidak menyentuh dilema nyata yang mereka hadapi (Wawancara Mhs-8). Ini tidak serta-merta membatalkan gagasan Kampus Benteng Pancasila; ia justru mengingatkan bahwa keberhasilan tidak ditentukan oleh banyaknya simbol, melainkan oleh kualitas pengalaman dan keberanian institusi merawat ruang kritik.

Discussion

Benang merah temuan ini mengarah pada satu intuisi yang terasa sederhana tapi menuntut: kewarganegaraan di kampus bukan terutama soal “apa yang diketahui mahasiswa,” melainkan “bagaimana kampus mengondisikan pengalaman” sehingga pengetahuan berubah menjadi kebiasaan etis. Di sini, rasa memiliki (*belonging*) menjadi pintu awal. Literatur tentang keterikatan mahasiswa mengingatkan bahwa keterlibatan tumbuh ketika mahasiswa merasa diakui, aman, dan punya tempat dalam komunitas belajar; pengalaman “*belonging*” sering

menjadi prasyarat bagi partisipasi yang lebih luas di ruang publik kampus (Dost & Smith, 2023; Masika & Jones, 2016). Dalam konteks *Kampus Benteng Pancasila*, rasa memiliki ini tidak netral: ia diarahkan oleh etika Pancasila agar kebersamaan tidak berubah menjadi eksklusivitas.

Kerangka *global citizenship education* (GCE) sendiri, jika dibaca dari peta riset 10 tahun terakhir menunjukkan bahwa “global” mudah tergelincir menjadi kosmetik internasionalisasi bila tidak diinstitusikan dalam kurikulum, pengalaman, dan budaya akademik. Analisis kritis tentang program GCE di perguruan tinggi menekankan pentingnya *institutionalisation*: bukan sekadar menambah mata kuliah atau kegiatan, melainkan membangun konsistensi antara tujuan, pedagogi, dan pengalaman mahasiswa (Aktas et al., 2016). Dua tinjauan besar juga menunjukkan pola serupa: riset GCE cenderung beragam orientasi (dari liberal hingga kritis), sering timpang antara retorika nilai dan bukti transformasi, serta membutuhkan perhatian pada konteks kuasa, ketimpangan, dan desain pembelajaran yang konkret (Goren & Yemini, 2017; Horey et al., 2018). Dalam titik ini, gagasan “arena integrasi” pada artikel ini tidak berangkat dari ambisi menyatukan dua istilah besar, melainkan dari kebutuhan praktis: membangun jalur pengalaman yang membuat nasionalisme dan kewargaan global saling membentuk, bukan saling meniadakan.

Perdebatan tentang tipologi GCE menjadi relevan bukan sebagai pameran konsep, melainkan sebagai cermin. Pashby dkk, memetakan bagaimana GCE bergerak dalam spektrum orientasi dan bagaimana perbedaan orientasi itu berpengaruh pada isi, pedagogi, dan “jenis warga” yang dibayangkan (Sant et al., 2018). Temuan artikel ini cenderung menguatkan posisi bahwa jangkar etik lokal (Pancasila) justru bisa menjadi prasyarat bagi GCE yang tidak mengambang. Menjadi warga dunia, dalam pengalaman partisipan, tidak berarti menipiskan identitas nasional; ia berarti memperluas tanggung jawab moral sambil menjaga batas etis pada dehumanisasi, ujaran kebencian, dan logika kekerasan. Seruan dekolonisasi pendidikan tinggi mengingatkan bahwa internasionalisasi sering membawa hierarki pengetahuan, siapa yang dianggap “pusat,” siapa yang sekadar “kasus pinggiran.” Adefila dkk, menunjukkan bagaimana suara dan lokasi geografis dalam debat dekolonisasi ikut menentukan arah perubahan, dan mengapa kurikulum global perlu sensitif pada relasi kuasa dan warisan kolonial (Adefila et al., 2021). Temuan artikel ini, ketika dibaca melalui lensa tersebut, menuntut kehati-hatian: integrasi nasionalisme–kewargaan global tidak cukup berbicara tentang “membuka diri,” tetapi juga tentang siapa yang menentukan definisi “global” dan pengalaman apa yang dianggap sah sebagai pengetahuan. Dalam nada yang sejalan, Waghid dan Hungwe mengajukan pentingnya *Ubuntu* sebagai horizon etik yang bisa menantang individualisme dalam GCE (Hungwe, 2023), sementara Bosio memperlihatkan bagaimana pendidik di *Global South* menegosiasikan GCE dalam kondisi institusional yang tidak selalu ideal (Bosio, 2023).

Pada level mekanisme, temuan tentang kurikulum, pengalaman, dan refleksi bersinggungan kuat dengan tradisi *service-learning* dan pembelajaran berorientasi keterlibatan. Dua studi tentang program *mandatory academic service-learning* menunjukkan bahwa pengalaman pelayanan yang terstruktur, terutama bila diikuti refleksi yang serius berkaitan dengan keterlibatan sipil yang lebih berkelanjutan bahkan setelah lulus (Knapp, 2010). Dari sisi dampak afektif-moral, meta-analisis tentang *service-learning* juga menegaskan kontribusinya terhadap empati mahasiswa, sebuah kapasitas yang sering menjadi jembatan antara “memahami isu” dan “mau bertindak” (Mihailidis, 2018). Temuan kasus India menunjukkan bahwa *service-learning* dapat mengubah pola keterlibatan, terutama ketika mahasiswa merasakan hubungan nyata antara kelas dan komunitas (Jaffer, 2021). Dalam konteks Indonesia, tinjauan sistematis tentang pemrograman *civic engagement* di pendidikan tinggi juga mengisyaratkan bahwa desain program bukan sekadar intensitas kegiatan yang menentukan kualitas *output* kewargaan (Maulana, 2023). Artinya, “laboratorium” bukan

metafora kosong: ia menuntut protokol pedagogis yang jelas, ruang refleksi yang aman, dan penilaian yang tidak hanya seremonial semata.

Temuan tentang ketegangan (sebagian mahasiswa memandang program sebagai *branding*) juga dapat dibaca sebagai gejala yang lebih luas: di banyak demokrasi, Pendidikan Kewarganegaraan menghadapi kelelahan publik, sinisme, dan ketidakpercayaan. Pontes dkk menandai kompleksitas pembentuk partisipasi politik anak muda dan mengingatkan bahwa sekolah/kampus tidak bekerja sendirian; ia beroperasi dalam ekosistem keluarga, teman sebaya, media, dan organisasi (A I Pontes, 2019). Dalam konteks naiknya populisme, Westheimer mengingatkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan berhadapan dengan godaan simplifikasi, seperti narasi “kita vs mereka” yang justru merusak kapasitas demokratis (Westheimer, 2019). Di ranah digital, Mirra dan Garcia menunjukkan bagaimana kaum muda bernegosiasi dalam ruang publik multimodal yang penuh peluang sekaligus penuh distorsi (Mirra & Garcia, 2017; Tarsidi et al., 2023a). Di Indonesia, studi tentang aktivisme digital mahasiswa pada masa pandemi memperlihatkan pergeseran pola keterlibatan dari aksi konvensional ke ruang daring, sekaligus menegaskan bahwa “ruang publik” kini tidak bisa dilepaskan dari platform digital (Tarsidi et al., 2023b; Yusuf, 2021). Jika temuan-temuan ini ditarik ke kasus Kampus Benteng Pancasila, maka integrasi nasionalisme–kewargaan global perlu memasukkan literasi *platform* dan etika informasi sebagai bagian dari latihan kewargaan, bukan sekadar pelengkap.

Di titik ini, kontribusi artikel ini dapat ditegaskan sebagai model konseptual “arena integrasi” berbasis tiga mekanisme. Mekanisme pertama bersifat spasial-simbolik: nilai Pancasila dihadirkan sebagai pengalaman ruang yang membentuk rasa memiliki dan batas etis pergaulan. Mekanisme kedua bersifat kurikuler-eksperiensial: nasionalisme dan kewargaan global dipelajari melalui proyek nyata (pengabdian, wisata kampus bernilai, organisasi) yang diikat oleh tugas akademik dan refleksi. Mekanisme ketiga bersifat dialogis-jaringan: kampus menciptakan kesempatan dialog lintas identitas termasuk melalui skema *virtual exchange* dan pengalaman global daring agar “global” dialami sebagai perjumpaan, bukan sekadar wacana (Helm et al., 2024). Ketiganya dikunci oleh refleksi moral: ruang memberi situasi, pengalaman memberi bahan, dialog memberi perspektif; refleksi memberi arah.

Implikasi praktisnya terasa cukup konkret. (1) penguatan Kampus Benteng Pancasila perlu bergerak dari agenda seremoni ke desain pengalaman: kalender kegiatan kemahasiswaan dan MKWK PKn disusun sebagai jalur perkembangan (dari orientasi nilai, proyek sosial, refleksi etis, dan aksi publik yang bertanggung jawab). (2) wisata kampus Pancasila sebaiknya tidak berhenti sebagai tur simbol, melainkan menjadi pedagogi tempat: tiap titik ruang dihubungkan dengan dilema kewargaan kontemporer (misinformasi, intoleransi, ketimpangan, krisis iklim) agar nasionalisme tidak jatuh menjadi nostalgia. (3) literasi digital perlu diposisikan sebagai bagian inti dari kewargaan: mahasiswa dilatih bukan hanya “aktif,” tetapi juga *bertanggung jawab* dalam produksi dan sirkulasi informasi.

CONCLUSION

Kampus dapat berfungsi sebagai laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan ketika nasionalisme dan kewargaan global tidak diperlakukan sebagai dua agenda yang berjalan sendiri-sendiri, melainkan diintegrasikan melalui rancangan pengalaman yang nyata dan berulang. Pada konteks *Kampus Benteng Pancasila*, integrasi itu tampak bekerja ketika Pancasila hadir sebagai pengalaman ruang yang memfasilitasi perjumpaan lintas identitas, pembelajaran kewarganegaraan bergerak dari ceramah menuju partisipasi yang disertai refleksi moral, dan orientasi global dipahami sebagai kemampuan membaca isu bersama serta bertindak tanpa kehilangan jangkar kebangsaan; dengan demikian, nasionalisme memperoleh

bentuk yang lebih dewasa (tanggung jawab publik), sementara kewargaan global menjadi lebih bumi (empati dan kerja sama lintas batas yang tetap berpijak pada martabat manusia). Meski demikian, studi ini memiliki keterbatasan yang perlu diakui: jangkauan penelitian bersifat studi kasus pada satu kampus sehingga generalisasi harus dilakukan secara hati-hati; data juga sangat bergantung pada akses partisipan dan situasi sosial saat pengumpulan data, sehingga pengalaman kelompok yang lebih diam, skeptis, atau jauh dari program nilai mungkin belum tertangkap sepenuhnya; selain itu, penelitian ini belum menelusuri dampak jangka panjang terhadap praktik kewargaan mahasiswa setelah lulus. Karena itu, riset lanjutan disarankan bergerak ke arah komparatif lintas kampus untuk menguji apakah mekanisme integrasi ini konsisten pada konteks kelembagaan yang berbeda, serta studi longitudinal untuk melihat apakah pengalaman ruang, partisipasi, dan refleksi benar-benar membentuk disposisi kewargaan yang bertahan; di saat yang sama, pengembangan konsep “arena integrasi” dapat dipertajam menjadi model operasional yang lebih terukur, misalnya dengan indikator kualitas dialog, kedalaman refleksi, dan keterhubungan isu global dengan tindakan lokal agar dapat diuji dan disempurnakan pada penelitian berikutnya.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada pihak Universitas Sebelas Maret dan unit terkait yang memfasilitasi akses data dan kegiatan penelitian, khususnya LPPM, Pusat Studi Pengamalan Pancasila, para dosen dan mahasiswa yang bersedia menjadi partisipan.

BIBLIOGRAPHY

- Adefila, A., Teixeira, R. V., Morini, L., Teixeira, M. L., Mara, T., Guerra, Z., Delboni, F., Spolander, G., & Khalil-babatunde, M. (2021). Higher education decolonisation : # Whose voices and their geographical locations? *Globalisation, Societies and Education*, 0(0), 1–15. <https://doi.org/10.1080/14767724.2021.1887724>
- Aktas, F., Pitts, K., & Richards, J. C. (2016). *Institutionalizing Global Citizenship: A Critical Analysis of Higher Education Programs and Curricula*. <https://doi.org/10.1177/1028315316669815>
- Banks, J. (2015). Failed citizenship, civic engagement, and education. *Kappa Delta Pi Record*, 51(4), 151–154. <https://doi.org/10.1080/00228958.2015.1089616>
- Bosio, E. (2023). *Global South university educators' perceptions of global citizenship education : Reflective dialogue , social change , and critical awareness*.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Creswell, J. W. (2010). *Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan campuran*. Pustaka Pelajar.
- Dost, G., & Smith, L. M. (2023). Understanding higher education students' sense of belonging : a qualitative meta-ethnographic analysis ABSTRACT. *Journal of Further and Higher Education*, 47(6), 822–849. <https://doi.org/10.1080/0309877X.2023.2191176>
- Goren, H., & Yemini, M. (2017). Global citizenship education redefined – A systematic review of empirical studies on global citizenship education. *International Journal of Educational Research*, 82, 170–183. <https://doi.org/10.1016/j.ijer.2017.02.004>
- Helm, F., Baroni, A., & Acconcia, G. (2024). Global citizenship online in higher education. *Educational Research for Policy and Practice*, 23(1), 1–18. <https://doi.org/10.1007/s10671-023-09351-6>
- Horey, D., Fortune, T., Nicolacopoulos, T., Kashima, E., & Mathisen, B. (2018). Global Citizenship and Higher Education: A Scoping Review of the Empirical Evidence. *Journal of Studies in International Education*, 22(5), 472–492. <https://doi.org/10.1177/1028315318786443>
- Hungwe, J. P. (2023). *' Globalizing ' ubuntu for global citizenship education : A decolonial*

- perspective. 18(2), 215–227.
- Jaffer, R. (2021). *Service-learning effects on student civic engagement and community - A case study from India*. 2005. <https://doi.org/10.1177/17461979211041334>
- Knapp, T. (2010). Service-learning's impact on college students' commitment to future civic engagement, self-efficacy, and social empowerment. *Journal of Community Practice*, 18(2), 233–251. <https://doi.org/10.1080/10705422.2010.490152>
- Lin, A. (2015). Citizenship education in American schools and its role in developing civic engagement: a review of the research. *Educational Review*, 67(1), 35–63. <https://doi.org/10.1080/00131911.2013.813440>
- Masika, R., & Jones, J. (2016). *Teaching in Higher Education Building student belonging and engagement: insights into higher education students' experiences of participating and learning together*. 2517(February). <https://doi.org/10.1080/13562517.2015.1122585>
- Maulana, M. Y. (2023). *A systematic literature review on civic engagement program through citizenship education*. 20(2), 341–358.
- Mihailidis, P. (2018). Civic media literacies: re-Imagining engagement for civic intentionality*. *Learning, Media and Technology*, 43(2), 152–164. <https://doi.org/10.1080/17439884.2018.1428623>
- Mirra, N., & Garcia, A. (2017). Civic Participation Reimagined: Youth Interrogation and Innovation in the Multimodal Public Sphere. *Review of Research in Education*, 41(1), 136–158. <https://doi.org/10.3102/0091732X17690121>
- OECD. (2025). *Global Education Monitoring Report 2025*.
- Oxfam. (2006). *Education for global citizenship: A guide for schools*. Oxfam GB.
- Pontes, A. I. (2019). Youth political (dis)engagement and the need for citizenship education: Encouraging young people's civic and political participation through the curriculum. *Education, Citizenship and Social Justice*, 14(1), 3–21. <https://doi.org/10.1177/1746197917734542>
- Pontes, Ana Isabel, Henn, M., & Griffiths, M. D. (2019). Youth political (dis)engagement and the need for citizenship education: Encouraging young people's civic and political participation through the curriculum. *Education, Citizenship and Social Justice*, 14(1), 3–21. <https://doi.org/10.1177/1746197917734542>
- Sant, E., Davies, I., Pashby, K., & Shultz, L. (2018). *Global Citizenship Education*. Bloomsbury Academic. <https://doi.org/10.5040/9781474286749>
- Tarsidi, D. Z. (2025). The Dynamics of Nationalism and Global Citizenship in the Development of the Pancasila Campus Tourism Model. *International Journal of Religion Education and Law*, 4(2), 145–152. <https://doi.org/10.57235/ijrael.v4i2.6772>
- Tarsidi, D. Z., Suryadi, K., Budimansyah, D., & Rahmat, R. (2023a). Social media usage and civic engagement among Indonesian digital natives: An analysis. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 20(257–269). <https://doi.org/DOI.https://doi.org/10.21831/jc.v20i2.60812>
- Tarsidi, D. Z., Suryadi, K., Budimansyah, D., & Rahmat, R. (2023b). Unveiling Utopian Civic Engagement: Empowering Digital Natives through Digital Literacy for a Better Future. *IJRAEL: International Journal of Religion Education and Law*, 2(2), 115–125. <https://doi.org/10.57235/ijrael.v2i2.681>
- UNESCO. (2020a). *Global Citizenship Education: Taking it Local*.
- UNESCO. (2020b). *Global education monitoring report 2020: Inclusion and education---All means all*. UNESCO.
- Westheimer, J. (2019). Civic Education and the Rise of Populist Nationalism Civic Education and

- the Rise of Populist Nationalism. *Peabody Journal of Education*, 94(1), 4–16. <https://doi.org/10.1080/0161956X.2019.1553581>
- Yusuf, N. (2021). Civic engagement : Digital activism of university students in Malang amidst covid-19 pandemic Civic engagement : Digital activism of university students in malang amidst Covid-19 pandemic. *Jurnal Civics : Media Kajian Kewarganegaraan*, 18(2), 286–295.
- Zahabioun, S., Yousefy, A., Yarmohammadian, M. H., & Keshtiaray, N. (2013). *Global Citizenship Education and Its Implications for Curriculum Goals at the Age of Globalization*. 6(1), 195–206. <https://doi.org/10.5539/ies.v6n1p195>